Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri yang Mengajukan Cerai Gugat Telaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007

Khairilina

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

<p>Received Date. 2 Juni 2021 Revised Date. 15 Juni 2021 Accepted Date. 25 Juni 2021</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to find out about the decision of the supreme court number 137k/AG/2007 regarding the provision of iddah to the wife who filed for divorce. The research method used is normative research with the category of judicial case study with qualitative characteristics, using normative law and law in its application (law in action). Whereas based on the Jurisprudence of the Supreme Court with its Decision Number 137 K/AG/2007 dated February 6, 2008, it is also based on the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 03 of 2018 point 3 Results of the plenary session of the Religious Chamber, namely regarding the obligations of husbands due to divorce to wives who are not nusyuz, accommodates Perma No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating cases of women dealing with the law, then the wife in divorce cases can be given mut'ah and Iddah maintenance , as long as it is not proven nusyuz, and in line with that the Supreme Court through SEMA No. 02 of 2019 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2019 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a task guide for Court Apparatus regarding the formulation of the Religious Chamber, that in the context of implementing PERMA No. 3 of 2007 regarding guidelines for adjudicating cases of women dealing with the law to provide legal protection for women's rights after divorce, so if there is an imposition of obligations for the husband in a divorce, such as Iddah and others, the order can be formulated as "paid before the defendant takes the divorce certificate.</i></p>
<p>The Keywords: <i>Iddah livelihood Divorce sue</i></p>	
<p>Kata Kunci: <i>Nafkah Iddah Cerai Gugat</i></p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang putusan mahkamah agung nomor 137k/AG/2007 tentang pemberian nafkah iddah kepada isteri yang mengajukan cerai gugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan kategori judicial case study yang berciri kualitatif, menggunakan hukum normatif dan hukum dalam penerapannya (law in action). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 tersebut, juga Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan hal sejalan dengan itu Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.</p>

PENDAHULUAN

Negara sudah mengatur perceraian sedemikian rupa sehingga perempuan yang umumnya menjadi korban dari perceraian dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya ia terima, misalnya nafkah pasca perceraian. Negara ingin agar pihak laki-laki dapat lebih bertanggung jawab terhadap mantan isterinya, karena tidak sedikit dari para perempuan yang bercerai tidak lagi memiliki sandara nafkah.

Islam hanya mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan terus menerus dalam rumah tangga. Setelah dipertimbangkan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka yang terus menerus hidup dalam perselisihan, dalam konflik keluarga, konflik batin, yang hidup membara kalbu dalam satu rumah tangga (Sopyan, 2011).

Perempuan yang kedudukannya sebagai istri dalam rumah tangganya, menurut doktrin agama dan budaya menunjukkan sebagai figur yang ideal dan baik. Muhammad menyatakan bahwa tradisi yang berlaku dalam masyarakat perempuan yang merupakan istri harus menjadi penurut, patuh dan taat kepada suami. Meskipun demikian, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya yang membuat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan suaminya (Manan, 2008).

Apabila terjadi perceraian, hak yang ada pada suami dan istri sama. Yakni mereka mempunyai hak yang sama mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama bagi masyarakat muslim. Bedanya jika suami yang menggugat maka diajukan dalam bentuk permohonan cerai talak, sedangkan bila istri yang menggugat diajukan dalam bentuk gugatan cerai atau cerai gugat. Di sini dapat kita pahami bahwa cerai tidak hanya menjadi hak suami saja, tetapi istri juga dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya bahwa rumah tangga yang dibinanya itu tidak mungkin dapat diteruskan (Sopyan, 2011). Akibat dari terjadinya talak (talak raj'i) yang diajukan oleh suami, maka ada pembebanan iddah kepada suami yang mentalak istrinya.

Berkaitan dengan akibat perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 41 huruf c diatur salah satu dari akibat perceraian "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri (Manan, 2008).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur akibat perceraian (talak oleh suami) dalam Pasal 149 huruf b "Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) yang layak kepada mantan istri selama istri menjalani masa iddah, kecuali mantan istrinya telah dijatuhi talak bain (talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan) atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

Pembebanan nafkah iddah ini kepada suami yang mentalak atau menceraikan istrinya adalah sebagai bentuk tanggung jawab suami dan juga konsekuensi bagi suami yang menceraikan istrinya, dikarenakan si istri yang dijatuhi talak raj'i/diceraikan itu selama menjalani masa iddah tidak boleh menikah ataupun menerima pinangan dari laki-laki lain hingga masa iddah nya berakhir. Dalam masa iddah ini masih ada hak suami yang menceraikannya jika ingin kembali kepadanya atau yang biasa kita kenal dengan istilah 'ruju' (Muhammad, 2009).

Di Negara Malaysia mengatur tentang nafkah iddah dalam Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Bahagian VI - Nafkah Isteri, Anak dan lain-lain, Seksyen 59. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi isteri, dan akibat nusyuz.

1. Tertakluk kepada Undang-Undang Islam, Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
2. Tertakluk kepada Undang-Undang Islam dan pengesahan Mahkamah, seorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz*, atau enggan dengan tidak sepatutnya menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain
 - a. apabila dia menjauhkan dirinya atau enggan disetubuhi oleh suaminya;
 - b. apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau
 - c. apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke suatu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Undang-Undang Islam.
3. Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi *nusyuz*.

Dapat dipahami bahwa pengaturan tentang pemberian nafkah iddah akibat perceraian di Negara Malaysia kurang lebih sama seperti yang diatur di Negara Indonesia, yaitu nafkah iddah dapat diberikan kepada istri yang diceraikan dengan syarat tidak *nusyuz*. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Ordinan 43 Tahun 2001 Negeri Serawak Malaysia yang telah penulis sebutkan di atas.

Negara Pakistan punya aturan hukum yang berbeda, mereka mengatur juga tentang perceraian dengan UU Perceraian 1939 yang terbentuk sebagai sebuah implementasi pengaruh warna madzhab hanafi yang kuat di masyarakat Pakistan ketika itu. Menurut regulasi ini, seorang istri diperbolehkan mengajukan cerai apabila terdapat hal-hal sebagaimana ditentukan undang-undang yang terdapat pada suami. Pasal 2 UU ini masih diberlakukan saat ini dan dikukuhkan keberadaannya oleh MFLO 1961. Namun, penulis tidak menemukan pasal yang mengatur tentang pemberian nafkah iddah akibat terjadi perceraian.

Aturan dasar lain dalam UU Perceraian 1939 yang masih dipakai hingga saat ini adalah hukum perceraian bagi istri yang murtad. Sebagaimana pasal 4 UU ini menetapkan jika seorang istri meninggalkan Islam, maka dengan sendirinya ia kehilangan hak untuk mengajukan gugatan cerai pada suami, namun seorang suami dapat menceraikan istrinya atas dasar istri murtad sesuai dengan MFLO 1961.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa jika terjadi perceraian karena talak bain sughra (gugatan cerai diajukan oleh istri), mantan istri tetap memperoleh nafkah iddah berupa maskan, kiswah dan nafkah sehari-hari. Ketentuan ini, secara umum berbeda dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa nafkah iddah hanya ditetapkan pada perceraian karena talak raj'i atau talak yang dijatuhkan oleh suami.

Setidaknya ada dua yurisprudensi utama yang mengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya sekalipun perceraian terjadi karena talak bain sughra. Kedua putusan ini menjadi pijakan awal bagi putusan-putusan selanjutnya yang mulai menerapkan pembebanan nafkah iddah jika terjadi perceraian karena talak bain sughra.

Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008. Dalam putusan kasasi ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sughra oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010. Putusan ini menciptakan norma hukum baru terkait akibat perceraian karena talak bain sughra. Mahkamah Agung menetapkan bahwa sekalipun talak yang jatuh adalah talak bain sughra, namun oleh karena penyebab perceraian justru dari pihak suami (karena pihak suami menikah lagi dengan perempuan lain dan menimbulkan sakit hati yang luar biasa mendalam bagi istrinya), suami diwajibkan membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada istrinya.

Berkenaan dengan akibat talak berupa nafkah iddah, dalam tulisan ini penulis ingin menganalisa tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menurut penulis berbeda dengan aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, di mana dalam Putusan kasasi sebuah perkara cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri), Hakim Agung Mahkamah Agung membebaskan nafkah iddah kepada mantan suami yang dijatuhi talak bain oleh Mahkamah Agung. Penulis melihat ada pertentangan hukum dalam putusan kasasi tersebut dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Tulisan ini hanya membahas tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 yang membebaskan nafkah iddah kepada suami meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri dan perceraian terjadi dengan talak bain sughra. Dalam Pasal 149 KHI menyebutkan akibat talak berupa nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah jatuh talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Putusan kasasi ini tentu bertentangan dengan Pasal 149 KHI sebagaimana telah disebutkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa landasan pemikiran yang menjadi pertimbangan Hakim Agung dalam kasus ini menetapkan nafkah iddah bagi istri yang jatuh talak bain?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan kategori judicial case study yang berciri kualitatif, menggunakan hukum normatif dan hukum dalam penerapannya (law in action). pengumpulan data penulis menggunakan metode library research yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, kemudian dianalisis secara eksploratif dengan sifat terbuka dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi.

LANDASAN TEORI

Cerai yang diajukan oleh pihak perempuan ke Pengadilan Agama. Bahwa Percerian/Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan yang berasal dari kata itlaq (الطلاق)

(yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan (Kamal, 2007). Talak menurut istilah syara'yaitu: "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri" (Abd.Rahman Ghazaly, 2010). Dalam fiqh talak mempunyai dua arti, yaitu: 1) Dalam arti yang umum, Talak ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri; dan 2) Dalam arti yang khusus, Talak ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami (Soemiyati, 2007)

Cerai gugat berdasarkan Pasal 114 KHI adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) (Inpres No. 1 Tahun 1990)

Nafkah berarti belanja hidup (uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari atau juga berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Iddah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Dalam istilah agama, *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Jadi, *iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan (Slamet Abidin-Aminudin, 1999)

Nafkah *iddah* merupakan hak istri yang diceraikan dengan talak raj'i atau dengan kata lain disebut sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya selama istrinya menjalani masa *iddah*. Dimana suami dalam masa tersebut masih ada hak untuk merujuk atau kembali kepada istri yang ditalak tersebut sebelum habis masa *iddahnya*, begitu juga istri yang ditalak tersebut tidak boleh menerima pinangan atau pun menikah dengan pria lain hingga suaminya merujuknya atau sampai *iddahnya* habis. Maka selama menjalani masa menunggu inilah beban nafkah ditanggung oleh mantan suami yang menceraikannya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Metokusumo & Soedikdo, 1999)

Adapun permohonan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama kebanyakannya diputus dengan putusan talak ba'in sughra dengan konsekwensi talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *Iddah* (HS. Al-Hamdani, 1989)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *Iddah*. Kategori talak ba'in sughra, yaitu:

- a. Talak yang terjadi qobla al-dukhul;
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk; dan
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Terhadap ketentuan ketiga di atas, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pengadilan, di antara para imam mazhab berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, hakim tidak punya hak untuk

menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apa pun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten dan cacat (zakar terputus, dan pecah atau hilang buah zakar). Adapun karena suami tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak suami (Muhammad, 1996)

Adapun Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim yang salah satu sebabnya adalah: bahwa Isteri merasa terancam baik serupa ucapan atau perbuatan suami. Apabila seorang isteri mengaku diancam oleh suami sehingga tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga, kalau pengakuan isteri itu terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia boleh menjatuhkan talak kepada isteri tersebut dengan talak Ba'in. Akan tetapi bilamana si isteri tidak mampu membuktikan pengakuannya, namun keluh kesahnya berulang-ulang dia sampaikan kepada hakim, maka hakim harus mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami isteri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa keluarga tersebut. Kedua hakam ini harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami isteri itu. Kalau usaha tersebut tidak berhasil, harus diteliti darimana datangnya kesulitan tersebut. Kalau kesulitan tersebut bersumber dari pihak laki-laki ataudari kedua belah pihak, maka kedua hakam itu memutuskan talak Ba'in bagi sang isteri yang keputusannya diberikan oleh hakim.

Mengenai nafkah sebagai hak istri dalam Iddah talak raj'i, para ulama mazhab sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya. Namun, kewajiban suami memberi nafkah tersebut akan gugur apabila istri nusyuz. Bahwa Dalam kitab-kitab fikih klasik telah disebutkan oleh para ahli fikih yang telah sepakat mengatakan perempuan yang ditalak raj'i (talak boleh kembali) oleh suaminya masih mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, Menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal bagi perempuan yang talak ba'in (talak tiga). Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais diatas. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi saw. yang menyuruh Fatimah binti Qais yang di talak tiga suaminya dan menjalani masa Iddahnya di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, yang ini ia artikan juga dengan demikian bahwa isteri tersebut juga tidak mendapatkan hak tempat tinggal (Ibnu Himan, tt)

Selain itu, di dalam kitab al-Mudawwanah karangan Sahnun, alasan Imam Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang ditalak ba'in kecuali dalam keadaan hamil adalah dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang dengan istri ketika dalam keadaan talak ba'in, karena kalau masih boleh bersenang-senang dengan Istri yang sudah di talak maka ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi mereka (Sahnun, tt), Imam Hanafi, ia berpendapat sama dengan Imam Syafi'i bahwa isteri yang ditalak Ba'in, maka isteri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Fatimah bin Qais diatas, bahwa ia telah ditalak tiga kali oleh suaminya sehingga tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal lagi.

Bahwa di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami mengenai hak isteri yang diceraikan karena talak dalam artian suami yang menceraikan istrinya sebagaimana bunyi Pasal 149

KHI, maka mantan istri dapat memperoleh hak-haknya yang meliputi: (a) mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; dan (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam hal cerai talak Kompilasi Hukum Islam menyatakan perempuan yang diceraikan masih mendapatkan nafkah baik berupa mut'ah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) yang tercakupi dengan nafkah selama masa Iddah (nafkah Iddah) selama 3 bulan, nafkah bagi yang sedang hamil sampai melahirkan (Iddah hamil), mahar selama masih belum dibayar, membayar mahar separuhnya apabila kabla dukhul (belum kumpul suami isteri) dan nafkah hadhanah anak sampai berusia 21 tahun, namun berbeda dengan cerai gugat, KHI sebagaimana tertulis dalam Pasal Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut, maka istri yang menggugat cerai tidak mendapatkan nafkah selama Iddahnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Kasasi ini berawal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Maswanih binti H Asnawi (Penggugat) yang menggugat cerai suaminya Jaharudin bin H Sapi'i (Tergugat) ke Pengadilan Agama Bekasi. Gugatan cerai diajukan dengan alasan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang juga adanya ancaman dengan senjata tajam dari Tergugat terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran. Selain itu Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih dua tahun sampai diajukan gugatan perceraian tersebut.

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 688/Pdt.G/2005/PA.Bks tanggal 25 Agustus 2005, Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan Penggugat, namun Tergugat melakukan upaya hukum banding. Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 28 November 2006, Majelis Hakim Banding membatalkan putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet onvankeljk verklaard (NO).

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Penggugat digolongkan pada gugatan obscur libel, karena ketidakcocokan umur Penggugat yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah serta ketidakjelasan tahun sewaktu Tergugat tidak memberi naskah. Dalam Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 137 K/AG/2007 Majelis Hakim menyatakan benar adanya perkawinan antara Pemohon Kasasi (Penggugat di tingkat pertama) dengan Termohon Kasasi (Tergugat di tingkat pertama), dan tidak pula ada kekeliruan tentang orangnya, artinya identitas dalam kutipan akta nikah dan orang yang mengajukan gugatan cerai serta yang menghadiri persidangan adalah orang yang benar/tidak terjadi kekeliruan.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung dan mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar. Selain itu Mahkamah Agung menambahkan amarnya karena menganggap amar putusan Pengadilan Agama Bekasi kurang lengkap. Dalam amarnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk memberiksan nafkah kepada ketiga anaknya minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Penulis kurang sependapat apabila perempuan yang diputus dengan Talak *ba'in Shugra* tidak mendapatkan nafkah *Iddah* seperti KHI tersebut, penulis lebih setuju dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomo 137 K/AG/2007 tersebut sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak *raj'i* berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*Iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba'in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya.

Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan *Iddah* hamil adalah *Iddah* yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa *Iddah* yang pendek, sudah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap sebagai hutang sejak suami menjatuhkan talaknya, dan hutang ini tidak bisa lunas, kecuali dengan membayarnya atau direlakan oleh istri. Pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan *tabi'in* lainnya dan al-Tsawri.

Bahwa Penulis juga berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (*posita*) dandiformalkan dengan adanya amar tuntutan (*petitum*) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* *raj'i* ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah*.²

² Secara etimologi *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berasal dari suku kata *qashada-yaqshiduqash* dan *maqshad* yang berarti *ityan al-syai'* (mendatangkan sesuatu), *tawajjuh* (mengarah), *istiqamah al-thariq* (jalan yang lurus) *aladlu* atau *al-tawassuth* (seimbang). Kata *syari'ah* secara bahasa berarti *al-din* (agama) dan *al-thariqah* (jalan) dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan jalan menuju sumber air. Menurut Ibnu Taimiyah secara istilah *syari'ah* berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik berupa akidah

Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (W.751 H) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alami* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi (Al-Jauziyah, 1993):

نغري الفئسي وحت الفه ا حبسب نغري الزمة وأملكة وأملال ولنيات

Artinya: Bahwa perubahan fatwa dapat berubah karena disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat.

Bahwa Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (*maqashid al-syari'ah*) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rasa keadilan, bukanlah hukum Islam

Menurut penulis ditinjau dari perspektif *maqashid al-Syari'ah*, maka di Indonesia sekarang ini seorang mantan istri selama dalam masa *Iddah* wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut baik dalam *Iddah* talak raj'i maupun talak *Ba'in sughra* (talak yang dijatuhkan Pengadilan) akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang wanita, setelah menikah maka kepengurusan dan tanggung jawab dirinya beralih dari kewajiban orang tuanya kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa *Iddahnya*.

Analisa Kasus

Bahwa salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif, berupa peraturan tentang Hukum Keluarga di Dunia Muslim, tidak terlepas di Negara Indonesia.

ataupun amaliah. Baca Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960, Juz 4, hal. 576; Secara terminologi *maqashid al-syari'ah* adalah *tahqiq al-maslahah linnas* (mewujudkan kemaslahatan manusia) dengan *jalbil manfa'ah* (mengambil manfaat) dan *daf'ulmafsadah* (menghindari kerusakan). Baca Muhammad Thahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, t.tp: Dar al-Basha'ir li intajy 'ilmy, 1988, hal. 171;

Pada umumnya ada beberapa hak perempuan yang bercerai atau diceraikan di Pengadilan Agama berupa hak nafkah Mut'ah, hak nafkah selama masa tunggu (Iddah) baik nafkahnya, tempat tinggal dan pakaiannya, nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang terhutang, Hak memelihara anak (Hadhanah), hak nafkah hadhanah hak atas harta gono gini (harta bersama);

Dalam keadaan cerai yang diajukan oleh Isteri cerai gugat dengan putusan talak ba'i³, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ulama dan baik ulama fikih klasik maupun ulama kontemporer terhadap pemberlakuan ada atau tidaknya hak-hak istri tersebut, dalam tulisan ini penulis membahas dengan membahas berkenaan dengan Hak nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah bagi istri yang menggugat cerai di Pengadilan Agama.

Beranjak dari kasus perceraian yang sudah dijelaskan di atas, Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat yang hanya menjatuhkan talak khul'i dengan iwadl. Kemudian di tingkat banding Majelis Hakim Banding membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dengan alasan obscur libel. Selanjutnya di tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan dan membenarkan putusan tingkat pertama, membatalkan putusan tingkat banding serta mengadili sendiri dengan menambah amar putusan dengan pembeban nafkah iddah kepada Tergugat.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut, setidaknya dapat dikemukakan beberapa argumentasi atau pandangan para ahli fiqh (yang mendasari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas) mengenai hak-hak istri yang ditalak bain sughra berupa nafkah.

- a. Pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak bain sughra (dan dalam keadaan ba'da dukhul) berhak atas nafkah iddah dan tempat tinggal (maskwan) sebagaimana istri yang ditalak raj'i. Hal ini karena istri yang ditalak bain sughra sekalipun tetap wajib menjalani masa iddah di mana dalam masa itu ia tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain.
- b. Istri yang ditalak bain sughra (dan dalam keadaan ba'da dukhul), sebagaimana istri yang ditalak raj'i, wajib menjalani masa iddah yang dimaksudkan sebagai *istibra'* (mengeahui ada tidaknya benih dalam rahim sang istri) yang juga merupakan kepentingan dari suaminya.
- c. Satu-satunya penghalang bagi istri memperoleh nafkah iddah dari suaminya (baik karena talak raj'i maupun karena talak bain sughra) adalah nusyuz atau istri membangkang terhadap suaminya. Pandangan ini merupakan kesepakatan dari seluruh Imam Mazhab.

Dalam kasus ini kehendak perceraian memang keinginannya istri, karena istri sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan suaminya. Melihat dalil posita yang ungkapkan istri sebenarnya perceraian ini terjadi karena sikap, perbuatan dan kelakuan suami dimana suami sering mengancam istrinya dengan senjata tajam ketika terjadi pertengkaran, suami juga tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

³ Talak ba'in merupakan talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru" Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakkahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 220-221.

Lagi pula istri tidak terbukti membangkang atau melawan suaminya sehingga tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Maka sudah sepantasnya perceraian ini terjadi, dan sudah tepat dan benar suami dihukum untuk membayar iddah kepada istrinya selama menjalani masa iddah nya. Kemudian, di era sekarang ini alasan perempuan mengajukan perceraian karena mengalami kekerasan fisik, suami tidak menafkahi dan suami meninggalkan rumah lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas. Yang kesemuanya ini merupakan kelalaian atau perbuatan salahnya suami terhadap istri, sehingga istri harus menanggung beban lahir dan batin.

Beberapa tahun belakangan ini sudah ada sejumlah ketentuan dan terobosan hukum yang dibuat Mahkamah Agung dan Badilag untuk memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengkomodir Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar yang menegaskan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut: "...yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai". Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, begitu juga dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 (halaman 149-150) dimana gugatan nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mut'ah dapat diajukan bersamaan dengan cerai gugat dan hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz.

Dan sejalan dengan hal tersebut, sekarang Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai." Sehingga hal ini lebih memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah *Iddah* nya tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 tersebut, juga Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah *Iddah*, sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan hal sejalan dengan itu Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai

Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah iddah dalam perkara kasasi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita.

REFERENSI

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahaat II*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Hamdani, HS. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. 1993. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin*, Juz III.

Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Ghazaly, Abd. Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*. Jakarta: Tiga
Pilar

Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,
Jakarta: Kencana

Metokusumo, Soedikdo, 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 2, Penerjema
Masykur

A.B, dkk. Jakarta: Lentera Basritama

Muhammad. 2009. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kia atas Wacana Agama dan Gender*.

LKIS: Pelangi Kasara

Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Sopyan, Yayan. 2011. *Islam dan Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam
dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh
Munakkahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana